



# LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

## UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BA.018.09.2300.634040.KD

### TAHUN ANGGARAN 2021



Jalan Raya Peninjauan, Narmada, Nusa Tenggara Barat



## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Mataram, 10 Januari 2022

Kepala Balai,

Dr. Ir. Awaludin Hipi, M.Si

NIP. 196711141998031001



## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mataram, 10 Januari 2022

Kepala Balai,

  
Dr. Ir. Awaludin Hipi, M.Si

NIP. 196711141998031001







## DAFTAR ISI

Kata Pengantar


Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab


Ringkasan

I.	Laporan Realisasi Anggaran	1
II.	Neraca	1
III.	Laporan Operasional	1
IV.	Laporan Perubahan Ekuitas	1
V.	Catatan atas Laporan Keuangan	7
A.	Penjelasan Umum	7
B.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	15
B.1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	16
B.2.	Belanja	16
B.3.	Belanja Pegawai	17
B.4.	Belanja Barang	18
B.5.	Belanja Modal	19
B.5.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19
B.5.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20
C.	Penjelasan atas Pos-pos Neraca	
C.1.	Aset Lancar	
C.1.1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	21
C.1.2.	Kas Lainnya dan Setara Kas	21
C.1.3.	Piutang Bukan Pajak	22
C.1.4.	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan ganti rugi	22
C.1.5.	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	23
C.1.6.	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	23
C.1.7.	Persediaan	24
C.2.	Aset Tetap	
C.2.1.	Tanah	24
C.2.2.	Peralatan dan Mesin	24
C.2.3.	Gedung dan Bangunan	26
C.2.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	26
C.2.5.	Aset Tetap Lainnya	27
C.2.6.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	27





C.3. Aset Lainnya	
C.3.1. Aset Tak Berwujud	28
C.3.2. Aset Lain-Lain	28
C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	29
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	
C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga	30
C.4.2. Uang Muka dari KPPN	30
C.5. Ekuitas	
C.5.1. Ekuitas	31
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	32
D.2. Beban Pegawai	32
D.3. Beban Persediaan	33
D.4. Beban Barang dan Jasa	34
D.5. Beban Pemeliharaan	34
D.6. Beban Perjalanan Dinas	35
D.7. Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat	36
D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi	37
D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	37
D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	38
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	
E.1. Ekuitas Awal	39
E.2. Surplus/Defisit-LO	39
E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	39
E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi	39
E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	39
E.4. Transaksi Antar Entitas	40
E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)	40
E.5. Ekuitas Akhir	40
F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	
F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	41
F.2. Pengungkapan Lain-lain	41



## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahunan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada Akhir Tahun 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp531,722,155.00 atau mencapai 107.93% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp492,667,000.00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp17,275,184,262.00 atau mencapai 97.82% dari alokasi anggaran sebesar Rp17,659,304,000.00.

### II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021 .

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp36,145,316,084.00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp436,286,348.00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp35,605,158,710.00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp103,871,026.00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp12,185,802.00 dan Rp36,133,130,282.00.

### III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp512,618,100.00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp18,945,827,332.00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-18,433,209,232.00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp86,956,555.00 dan Defisit Rp0.00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-18,346,252,677.00.



#### **IV. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp38,723,771,936.00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-18,346,252,677.00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-24,150,093.00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp15,779,761,116.00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp36,133,130,282.00.

#### **V. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NUSA TENGGARA BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Catatan	31 Desember 2021			31 Desember 2020
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	492,667,000.00	531,722,155.00	107.93	724,854,960.00
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>492,667,000.00</b>	<b>531,722,155.00</b>	<b>107.93</b>	<b>724,854,960.00</b>
<b>BELANJA</b>					
Belanja Pegawai	B.3.	7,830,300,000.00	7,535,282,575.00	96.23	7,646,122,959.00
Belanja Barang	B.4.	9,155,476,000.00	9,069,238,687.00	99.06	7,110,576,029.00
Belanja Modal	B.5.	673,528,000.00	670,663,000.00	99.57	453,507,415.00
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>17,659,304,000.00</b>	<b>17,275,184,262.00</b>	<b>97.82</b>	<b>15,210,206,403.00</b>





## II. NERACA

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NUSA TENGGARA BARAT  
NERACA

PER 31 Desember 2021 dan 31 DESEMBER 2020

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.1.	336,471,223.00	1,300,172,214.00
Piutang Bukan Pajak	C.1.2.	73,251,288.00	73,251,288.00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.3.	264,075,333.00	264,075,333.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.4.	-73,251,288.00	-73,251,288.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.5.	-264,075,333.00	-264,075,333.00
Persediaan	C.1.6.	99,815,125.00	303,762,277.00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>436,286,348.00</b>	<b>1,603,934,491.00</b>
<b>Aset Tetap</b>			
Tanah	C.2.1.	17,827,480,000.00	17,827,480,000.00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	15,014,840,998.00	14,871,861,398.00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	15,103,378,531.00	14,606,238,531.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	1,835,214,766.00	1,835,214,766.00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	45,902,000.00	71,712,000.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-14,221,657,585.00	-12,176,223,917.00
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>35,605,158,710.00</b>	<b>37,036,282,778.00</b>
<b>Aset Lainnya</b>			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	39,810,000.00	39,810,000.00
Aset Lain-lain	C.4.2.	986,035,998.00	1,064,969,598.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3.	-921,974,972.00	-1,010,665,423.00
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>103,871,026.00</b>	<b>94,114,175.00</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>36,145,316,084.00</b>	<b>38,734,331,444.00</b>
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1.	12,185,802.00	10,559,508.00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>12,185,802.00</b>	<b>10,559,508.00</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>12,185,802.00</b>	<b>10,559,508.00</b>
<b>Ekuitas</b>			
Ekuitas	C.6.	36,133,130,282.00	38,723,771,936.00
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>36,133,130,282.00</b>	<b>38,723,771,936.00</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>36,145,316,084.00</b>	<b>38,734,331,444.00</b>



### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NUSA TENGGARA BARAT LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	512,618,100.00	714,583,110.00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>512,618,100.00</b>	<b>714,583,110.00</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2.	7,537,167,764.00	7,646,502,959.00
Beban Persediaan	D.3.	1,935,878,477.00	1,998,106,271.00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	3,892,688,668.00	2,686,217,134.00
Beban Pemeliharaan	D.5.	666,830,244.00	767,949,979.00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1,645,386,685.00	656,635,640.00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	238,897,495.00	0.00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8.	961,097,875.00	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9.	2,067,880,124.00	2,107,229,701.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10.	0.00	-9,645,000.00
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>18,945,827,332.00</b>	<b>15,852,996,684.00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>-18,433,209,232.00</b>	<b>-15,138,413,574.00</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11.	19,104,055.00	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.11.	0.00	4,200,001.00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11.	67,852,500.00	736,443,888.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11.	0.00	1,028,022,833.00
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>86,956,555.00</b>	<b>-295,778,946.00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>-18,346,252,677.00</b>	<b>-15,434,192,520.00</b>



#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NUSA TENGGARA BARAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1.	38,723,771,936.00	37,949,596,394.00
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	E.2.	-18,346,252,677.00	-15,434,192,520.00
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR</b>	E.3.	-24,150,093.00	267,260,487.00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1.	-7,175,089.00	-2,250,000.00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	0.00	273,106,000.00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.3.	-16,975,004.00	-3,595,513.00
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	E.4.	<b>15,779,761,116.00</b>	<b>15,941,107,575.00</b>
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>	E.5.	<b>-2,590,641,654.00</b>	<b>774,175,542.00</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.6.</b>	<b>36,133,130,282.00</b>	<b>38,723,771,936.00</b>



## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan.

BPTP-NTB didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas dan fungsi pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi di Era Otonomi Daerah. Sejalan dengan visi Badan Litbang Pertanian, BPTP-NTB bertujuan untuk menjadi lembaga penelitian dan pengembangan pertanian berkelas dunia yang menghasilkan dan mengembangkan inovasi teknologi pertanian untuk mewujudkan pertanian industrial unggul berkelanjutan berbasis sumberdaya lokal. Melalui peranan BPTP-NTB diharapkan mampu melakukan percepatan alih teknologi pertanian, mendukung pembangunan pertanian spesifik lokasi dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya penelitian pertanian di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Untuk mewujudkan tujuan diatas BPTP-NTB berkomitmen dengan visi "menjadi lembaga pengkajian pertanian terdepan di Nusa Tenggara Barat untuk mewujudkan pertanian industrial berkelanjutan berbasis sumberdaya local dan berdaya saing". Untuk mewujudkan visi tersebut Balai Pengkajian Teknologi Pertanian – NTB melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- *Merancang, menghasilkan, dan mengembangkan inovasi pertanian spesifik lokasi, serta rekomendasi opsi-opsi kebijakan pembangunan pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dinamika kebutuhan masyarakat pertanian.*
- *Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan percepatan diseminasi inovasi pertanian kepada para pengguna serta meningkatkan penjangkauan umpan balik inovasi pertanian.*
- *Mengembangkan jaringan kerjasama lokal, nasional dan internasional dalam rangka penguasaan IPTEK, pengembangan pusat data agribisnis pertanian di daerah dan peningkatan peran BPTP NTB dalam pengembangan usaha dan sistem agribisnis, ketahanan pangan serta kesejahteraan petani.*

Mengembangkan kapasitas dan akuntabilitas BPTP NTB untuk menghasilkan inovasi pertanian bermutu, memberikan pelayanan-pelayanan prima kepada pengguna.

#### A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan



pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### **A.3. Basis Akuntansi**

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian





Nusa Tenggara Barat yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

**(1) Pendapatan - LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**(2) Pendapatan - LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.



- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
- a. Aset Lancar**
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
  - Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
  - Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
    - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
  - Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	



- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:  
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;  
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;  
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lain-Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.



### c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.



**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek
 

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.





Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

**(7) Ekuitas**

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat telah mengadakan 9 kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran Awal</b>	<b>Anggaran Setelah Revisi</b>
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	315,687,000.00	315,687,000.00
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	176,980,000.00	176,980,000.00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>492,667,000.00</b>	<b>492,667,000.00</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	8,072,800,000.00	7,688,800,000.00
Belanja Lembur	141,500,000.00	141,500,000.00
Belanja Barang Operasional	872,380,000.00	850,880,000.00
Belanja Barang Non Operasional	2,786,616,000.00	2,631,204,000.00
Belanja Barang Persediaan	3,288,250,000.00	1,664,997,000.00
Belanja Jasa	549,900,000.00	492,375,000.00
Belanja Pemeliharaan	657,170,000.00	666,870,000.00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1,876,000,000.00	1,649,150,000.00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0.00	238,900,000.00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0.00	961,100,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200,000,000.00	173,528,000.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	500,000,000.00	500,000,000.00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>18,944,616,000.00</b>	<b>17,659,304,000.00</b>



**B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp531,722,155.00 atau mencapai 107.93% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp492,667,000.00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	%
<b>Akun Pendapatan</b>			
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	176,980,000.00	185,468,000.00	104.80
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	315,687,000.00	37,689,355.00	11.94
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0.00	308,564,800.00	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>492,667,000.00</b>	<b>531,722,155.00</b>	<b>107.93</b>

Pada bulan Oktober 2021, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat telah melakukan Revisi DIPA atas setoran PNBPN. Setoran PNBPN awal sebesar Rp323,150,000.00 setelah revisi menjadi Rp.492,667,000,00. Rincian estimasi pendapatan (setelah revisi setoran PNBPN) dan realisasinya adalah sebagai berikut:

## Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	%
<b>Akun Pendapatan</b>			
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	176,980,000.00	185,468,000.00	104.80
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	315,687,000.00	37,689,355.00	11.94
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0.00	308,564,800.00	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>492,667,000.00</b>	<b>531,722,155.00</b>	<b>107.93</b>

Realisasi Pendapatan TA 2021 mengalami penurunan sebesar -26.64% dibandingkan TA 2020. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:



Perbandingan Realisasi Pendapatan  
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	185,468,000.00	89,110,000.00	108.13
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0.00	10,271,850.00	-100.00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	37,689,355.00	151,023,110.00	-75.04
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	308,564,800.00	474,450,000.00	-34.96
<b>Jumlah</b>	<b>531,722,155.00</b>	<b>724,854,960.00</b>	<b>-26.64</b>

Realisasi pendapatan TA.2021 dalam Laporan Realisasi Anggaran senilai Rp531,722,155 sementara nilai realisasi pendapatan pada Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan senilai Rp520,313,855. Terdapat selisih senilai Rp11,408,300. Nilai tersebut adalah pendapatan sewa rumah dinas dari Januari s/d Desember 2021 yang langsung di potong dari SPM sehingga tidak memiliki NTPN dan tidak tercatat pada Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan namun tercatat pada Laporan Realisasi Anggaran (aplikasi SAIBA).

## B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp17,275,184,262.00 atau 97.82% dari anggaran belanja sebesar Rp17,659,304,000.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per  
31 Desember 2021

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
<b>Akun Belanja</b>			
Belanja Pegawai	7,830,300,000.00	7,538,144,661.00	96.27
Belanja Barang	9,155,476,000.00	9,069,238,687.00	99.06
Belanja Modal	673,528,000.00	670,663,000.00	99.57
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>17,659,304,000.00</b>	<b>17,278,046,348.00</b>	<b>97.84</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>		<b>-2,862,086.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Belanja</b>	<b>17,659,304,000.00</b>	<b>17,275,184,262.00</b>	<b>97.82</b>



Dibandingkan dengan Tahun 2020, Realisasi Belanja Akhir Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 13.58% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain karena meningkatnya pagu anggaran dan realisasi untuk belanja barang dan belanja modal yang cukup signifikan di tahun 2021

Perbandingan Realisasi Belanja  
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	.%
Belanja Pegawai	7,535,282,575.00	7,646,122,959.00	-1.45
Belanja Barang	9,069,238,687.00	7,110,576,029.00	27.55
Belanja Modal	670,663,000.00	453,507,415.00	47.88
<b>Total Belanja</b>	<b>17,275,184,262.00</b>	<b>15,210,206,403.00</b>	<b>13.58</b>

### B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp7,535,282,575.00 dan Rp7,646,122,959.00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar -1.45% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh. Hal ini disebabkan antara lain karena berkurangnya jumlah PNS, yaitu 5 orang PNS yang pensiun dan 1 orang PNS pension karena meninggal dunia.

Perbandingan Belanja Pegawai  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7,396,648,661.00	7,581,467,926.00	-2.44
Belanja Lembur	141,496,000.00	69,992,000.00	102.16
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>7,538,144,661.00</b>	<b>7,651,459,926.00</b>	<b>-1.48</b>
<b>Pengembalian Belanja Pegawai</b>	<b>-2,862,086.00</b>	<b>-5,336,967.00</b>	<b>-46.37</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>7,535,282,575.00</b>	<b>7,646,122,959.00</b>	<b>-1.45</b>





Nilai realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2021 pada Laporan Realisasi Anggaran adalah Rp7,535,282,575 sementara nilai beban pegawai pada Laporan Operasional senilai Rp7,537,167,764. Dan Nilai beban pegawai pada Neraca Percobaan akrual senilai Rp7,540,029,850. Penjelasan atas selisih tersebut adalah sebagai berikut :

Uraian	NP	LO	Selisih NP dan LO	LRA
Beban Gaji Pokok	4,783,583,569	4,783,461,169	122,400	
Pengembalian Beban Gaji Pokok	(122,400)		(122,400)	
Beban Pembulatan Gaji PNS	65,356	64,870	486	
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(486)		(486)	
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	355,852,480	355,852,480	-	
Beban Tunj. Anak PNS	115,473,716	115,473,716	-	
Beban Tunj. Struktural PNS	20,880,000	20,880,000	-	
Beban Tunj. Fungsional PNS	952,940,000	952,940,000	-	
Beban Tunj. PPH PNS	34,228,069	34,228,069	-	
Beban Tunj. Beras PNS	284,103,660	284,103,660	-	
Beban Uang Makan PNS	736,697,000	734,872,800	1,824,200	
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	(1,824,200)		(1,824,200)	
Beban Tunjangan Umum PNS	114,710,000	113,795,000	915,000	
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	(915,000)		(915,000)	
Beban Uang Lembur	141,496,000	141,496,000	-	
<b>Total</b>	<b>7,537,167,764</b>	<b>7,537,167,764</b>	<b>-</b>	<b>7,535,282,575</b>
Jurnal penyesuaian per 31 Des 2021				1,759,189
Jurnal penyesuaian per 31 Des 2021				1,806,000
Jurnal penyesuaian per 01 Jan 2021				(1,680,000)
<b>Total</b>				<b>7,537,167,764</b>

Nilai jurnal penyesuaian sebesar Rp1,759,189 adalah nilai kekurangan gaji karena kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala a.n Kaharudin dan Suparman. Sementara nilai jurnal penyesuaian sebesar Rp1,806,000 adalah nilai kekurangan gaji karena kenaikan pangkat a.n Abdullah Sika, Darwis, Nani Herawati dan Fata Hasan Ihromy. Dilakukan jurnal penyesuaian per akhir tahun 2021 karena SK pengangkatan baru di terima pada 20 Desember 2021, jadi kekurangan gaji baru diusulkan di bulan Januari 2022.

Nilai selisih sebesar Rp.1,680,000 adalah pembayaran atas belanja pegawai yang masih harus dibayar pada akhir tahun 2020. Di akhir tahun 2020, terdapat belanja pegawai yang masih harus dibayar berupa tunjangan fungsional a.n Totok Blegoh dan Sabar untung. Pada awal tahun 2021, sudah dilakukan pembayaran dan telah dilakukan jurnal penyesuaian atas pembayaran belanja pegawai yang masih harus di bayar.



**B.4. BELANJA BARANG**

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp9,069,238,687.00 dan Rp7,110,576,029.00. Realisasi belanja barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 27.55% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya penambahan anggaran untuk beberapa kegiatan.

Perbandingan Belanja Barang  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	850,855,865.00	779,584,892.00	9.14
Belanja Barang Non Operasional	2,580,454,210.00	1,510,783,902.00	70.80
Belanja Barang Persediaan	1,664,078,825.00	2,555,226,813.00	-34.88
Belanja Jasa	461,637,488.00	386,968,832.00	19.30
Belanja Pemeliharaan	666,830,244.00	754,571,950.00	-11.63
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1,645,386,685.00	664,154,640.00	147.74
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	238,897,495.00	466,804,000.00	-48.82
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	961,097,875.00	0.00	0.00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>9,069,238,687.00</b>	<b>7,118,095,029.00</b>	<b>27.41</b>
<b>Pengembalian Belanja Barang</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,519,000.00</b>	<b>-100.00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>9,069,238,687.00</b>	<b>7,110,576,029.00</b>	<b>27.55</b>

Ditahun 2021 ini, salah satu kegiatan BPTP NTB adalah Hilirisasi Teknologi Badan Litbang Pertanian di Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini merupakan kegiatan Diseminasi Inovasi Teknologi, dan merupakan kegiatan PEN. PEN adalah Pemulihan Ekonomi Nasional. Hilirisasi teknologi pertanian adalah suatu proses pengelolaan produk pertanian melalui industri yang dikenal dengan sebutan agroindustry melalui pemberdayaan petani. Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kegiatan Hilirisasi Teknologi Badan Litbang di BPTP NTB bertujuan untuk perbaikan atau peningkatan nilai tambah produk pertanian. Adapun Perinciannya adalah sebagai berikut :

Akun	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Peruntukan
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	952,000,000	915,014,081	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsumsi Pertemuan, Bimtek dan workshop</li> <li>• Fotocopy dan dokumentasi</li> </ul>



Akun	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Peruntukan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahan pendukung kegiatan</li> <li>• Sewa Peralatan / gedung pertemuan</li> </ul>
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	69,750,000	69,739,000	ATK dan Komputer supplies
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	96,000,000	84,250,000	Honor Narasumber kegiatan Bimtek
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	812,250,000	809,297,556	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan pendampingan</li> <li>• Pengganti transport peserta pertemuan</li> </ul>
	Total	1,930,000,000	1,878,300,637	

Selain Kegiatan Hilirisasi, masih ada akun COVID pada Program Dukungan Manajemen dengan perincian sebagai berikut

Akun	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Peruntukan
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	10,275,000	10,274,352	Pembelian Masker, handsanitizer, sabun, desinfectan, vitamin dan makanan penambah daya tahan tubuh
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	25,000,000	24,935,000	Rapid Tes/Swab Test
	Total	35,275,000	35,209,352	

Pada Tahun Anggaran 2021 BPTP NTB melaksanakan kegiatan Perbenihan VUB Padi Hasil Inovasi badan Litbang Pertanian di Pulau Sumbawa. Kegiatan ini melibatkan sejumlah Kelompok tani dan penangkar benih dengan mengalokasikan dana pada mata anggaran Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda (526xxx) dengan perincian sebagai berikut:



Akun	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi
526115	Belanja Barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat / PEMDA		
	Bahan Utama dan Pendukung Kegiatan	238,900,000	238,897,495
526312	Belanja Barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah		
	UHL Pelaksanaan Kegiatan biaya produksi borongan (Pengolahan tanah, Panen)	375,200,000	961,097,875
	Pengangkutan calon benih, distribusi benih dan pengujian laboratorium)	585,900,000	
Total		1,200,000,000	1,199,995,370

Pagu Anggaran untuk kegiatan Perbenihan VUB Padi Hasil Inovasi badan Litbang Pertanian di Pulau Sumbawa adalah senilai Rp.1,200,000,000. Realisasi kegiatan adalah senilai Rp.1,199,995,370 ada selisih senilai Rp.4,630 yang tidak bisa di realisasi kan.

#### B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp670,663,000.00 dan Rp453,507,415.00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 47.88% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan pagu dan realisasi Belanja Modal pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Pada triwulan IV ada penambahan belanja modal peralatan dan mesin karena ada revisi atas setoran PNBK.

Perbandingan Belanja Modal  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173,523,000.00	406,007,415.00	-57.26
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	497,140,000.00	47,500,000.00	946.61
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>670,663,000.00</b>	<b>453,507,415.00</b>	<b>47.88</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>670,663,000.00</b>	<b>453,507,415.00</b>	<b>47.88</b>



**B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp173,523,000.00 dan Rp406,007,415.00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 mengalami penurunan sebesar -57.26% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya pengurangan pagu dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2021 karena Pandemi COVID.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173,523,000.00	406,007,415.00	-57.26
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>173,523,000.00</b>	<b>406,007,415.00</b>	<b>-57.26</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>173,523,000.00</b>	<b>406,007,415.00</b>	<b>-57.26</b>

Perincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Kode Aset	Nama Aset	Volume	Harga Satuan	Total
1	3030305076	Thermohygrostat	1	4,500,000	4,500,000
2	3040101999	Cultivator	2	33,000,000	66,000,000
3	3050201002	Meja Kerja kayu	1	25,000,000	25,000,000
4	3050201004	Kursi kayu	1	2,000,000	2,000,000
5	3050201008	Meja Rapat	4	1,400,000	5,600,000
6	3050201008	Meja Rapat Pimpinan	1	12,000,000	12,000,000
7	3050204004	A.C Split	1	4,700,000	4,700,000
8	3060101005	Power Ampli	1	5,000,000	5,000,000
9	3060102045	Tripot Camera	1	1,700,000	1,700,000
10	3060102165	Camera Conference	1	11,000,000	11,000,000
11	3080111999	Pipet alat Laborat	1	12,495,000	12,495,000
12	3100102001	Komputer Desktop	1	12,900,000	12,900,000
13	3100202017	Satelite Speaker	1	5,500,000	5,500,000
14	3100202017	Speaker bluetooth	1	5,128,000	5,128,000
<b>Total Pengadaan Peralatan dan Mesin per Juni 2021</b>					<b>173,523,000</b>





**B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp497,140,000.00 dan Rp47,500,000.00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 946.61% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan pagu dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun 2021 yang cukup signifikan. Di Tahun 2021 Belanja Modal Gedung dan Bangunan digunakan untuk memperbaiki bangunan lantai jemur permanen dan bangunan kandang yang ada di kantor BPTP-NTB di Narmada.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	497,140,000.00	47,500,000.00	946.61
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>497,140,000.00</b>	<b>47,500,000.00</b>	<b>946.61</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>497,140,000.00</b>	<b>47,500,000.00</b>	<b>946.61</b>

Perincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai
1	Bangunan Lantai Jemur Permanen	164,600,000
2	Bangunan untuk Kandang	218,240,000
3	Renovasi Lantai jemur	114,300,000
<b>Total</b>		<b>497,140,000</b>



## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1. ASET LANCAR

#### C.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp336,471,223.00 dan Rp1,300,172,214.00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas  
per 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2021
Saldo Hibah ACIAR	336,471,223.00
<b>Jumlah</b>	<b>336,471,223.00</b>

Saldo Hibah ACIAR telah disahkan dengan keluarnya SP2HL terlampir dalam laporan ini. Nama kegiatan yang didanai oleh Dana Hibah dari ACIAR tersebut adalah Improving Cattle Production and Smallholder Livelihoods in Crop-Based Farming Systems in Indonesia. Jangka waktu HIBAH ACIAR adalah 1 Oktober 2018 - 30 Juni 2021 diperpanjang s/d 31 Juli 2022. Perkembangan Kegiatan Hibah tersebut adalah :

- Pelaksanaan kegiatan penelitian rantai pasar sudah dihentikan sesuai dengan keputusan dari ACIAR-DFAT dan laporan capaian kegiatan rantai pasar sampai tahun 2020 sudah dilaporkan;
- Kegiatan produksi ternak meliputi penimbangan dan monitoring produksi ternak pembiakan, penggemukan dan pengembangan hijauan pakan lamtoro pada kelompok contoh atau Nodes terus berlanjut untuk 6 kabupaten terpilih;
- Pemasalan teknologi melalui lembaga pemasalan dinas, koperasi, organisasi masa dan kelompok ternak terus berlangsung, kegiatan visioning dan dukungan untuk kelompok pemasalan terus dilanjutkan pada 6 kabupaten terpilih;
- Survey rumah tangga tani dan gender sudah dilakukan dan dalam proses penyelesaian laporan

#### C.1.2. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp73,251,288.00 dan Rp73,251,288.00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:



Perbandingan Piutang Bukan Pajak  
per 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Piutang Lainnya	73,251,288.00	73,251,288.00
<b>Jumlah</b>	<b>73,251,288.00</b>	<b>73,251,288.00</b>

**C.1.3. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**  
Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp264,075,333.00 dan Rp264,075,333.00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi  
per 31 Desember 2021

No	Nama Debitur	31 Desember 2021
1.	CV Mustika	264,075,333.00
	<b>Jumlah</b>	<b>264,075,333.00</b>

Sesuai dengan Pasal 12 Undang-undang No. 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dijelaskan bahwa bagi instansi Pemerintah diwajibkan menyerahkan kepada PUPN terhadap piutang yang ada dan besarnya telah pasti menurut hukum tetapi penanggung hutang tidak mau bertanggung jawab atau melunasi. Maka Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat pada tanggal 30 April 2019 telah bersurat pada Kepala Panitia Urusan Piutang Negara perihal Pengalihan Piutang Negara senilai Rp.264,075,333.00 pada PUPN untuk di proses lebih lanjut. Pada tanggal 23 November 2020, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat melalui surat No.727/KU.320/H.12.17/11/2020 kembali bersurat pada Kepala Panitia Urusan Piutang Negara perihal Koreksi Pengalihan Piutang Negara CV. Mustika senilai Rp.337,326,621 yang merupakan denda keterlambatan senilai Rp73,251,288 dan Kemahalan harga hasil audit Inspektorat Jenderal No.R.139/PW.130/G.4/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 senilai Rp264,075,332.75.

**C.1.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak**

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-73,251,288.00 dan Rp-73,251,288.00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:



Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0,00	0,5%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00

**C.1.5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan  
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**

Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-264,075,333.00 dan Rp-264,075,333.00.

Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR  
per 31 Desember 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Macet	264,075,333.00	100%	264,075,333.00
<b>Jumlah</b>	<b>264,075,333.00</b>		<b>264,075,333.00</b>

**C.1.6. Persediaan**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp99,815,125.00 dan Rp303,762,277.00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Barang Konsumsi	42,688,616.00	47,722,277.00
Bahan Baku	40,575,625.00	256,040,000.00
<b>Jumlah</b>	<b>59,239,500.00</b>	<b>303,762,277.00</b>



Nilai barang persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan ke masyarakat sebesar Rp.92.194,250 merupakan nilai yang sudah di SPJ kan namun BAST nya masih dalam proses. Sementara Nilai Bahan baku sebesar Rp.26,700,000 merupakan hasil benih kedelai dan padi yang ada di gudang UPBS yang belum laku dijual.

## C.2. ASET TETAP

### C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp17,827,480,000.00 dan Rp17,827,480,000.00.

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp14,991,722,998.00 dan Rp14,871,861,398.00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>14,871,861,398.00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian	173,523,000.00
Reklasifikasi Masuk	288,592,137.00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	172,337,000.00
<b>Mutasi Kurang</b>	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-173,680,400.00
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	-700,000.00
Reklasifikasi Keluar	-292,092,137.00
Koreksi Pencatatan	-25,000,000.00
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>15,014,840,998.00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-11,553,008,416.00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>3,461,832,582.00</b>

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin adalah berupa :

1. Pembelian peralatan dan mesin senilai Rp. 164,323,000 dengan perincian sebagai berikut :

No	Kode Aset	Nama Aset	Volume	Harga Satuan	Total
1	3030305076	Thermohygrostat	1	4,500,000	4,500,000
2	3040101999	Cultivator	2	33,000,000	66,000,000
3	3050201002	Meja Kerja kayu	1	25,000,000	25,000,000
4	3050201004	Kursi kayu	1	2,000,000	2,000,000



No	Kode Aset	Nama Aset	Volume	Harga Satuan	Total
5	3050201008	Meja Rapat	4	1,400,000	5,600,000
6	3050201008	Meja Rapat Pimpinan	1	12,000,000	12,000,000
7	3050204004	A.C Split	1	4,700,000	4,700,000
8	3060101005	Power Ampli	1	5,000,000	5,000,000
9	3060102045	Tripot Camera	1	1,700,000	1,700,000
10	3060102165	Camera Conference	1	11,000,000	11,000,000
11	3080111999	Pipet alat Laborat	1	12,495,000	12,495,000
12	3100102001	Komputer Desktop	1	12,900,000	12,900,000
13	3100202017	Satelite Speaker	1	5,500,000	5,500,000
14	3100202017	Speaker bluetooth	1	5,128,000	5,128,000
<b>Total Pengadaan Peralatan dan Mesin per Juni 2021</b>					<b>173,523,000</b>

2. Reklasifikasi masuk senilai Rp.288,592,137. Reklasifikasi masuk ini merupakan perincian pencatatan atas peralatan dan mesin yang ada di TTP-Pototano. Sebagaimana di ketahui, TTP Pototano di hibahkan kepada Bapal Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat pada akhir tahun 2020.
3. Reklasifikasi dari asset lainnya ke asset tetap senilai Rp.172,337,000. Nilai ini terjadi karena adanya perubahan kondisi peralatan dan mesin dari rusak berat menjadi rusak ringan karena perbaikan.

Mutasi transaksi pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa :

1. Reklasifikasi dari asset tetap ke asset lainnya senilai Rp.173,680,400. Nilai ini merupakan nilai yang terjadi karena adanya penghentian asset tetap menjadi asset henti guna yang masuk pada asset lain-lain yang terjadi karena perubahan kondisi menjadi rusak berat.
2. Transaksi normalisasi BMN asset tetap senilai Rp.700,000. Transaksi ini dilakukan karena muncul nilai buku minus saat dilakukan Rekonsiliasi bulan Juni dan Desember.
3. Reklasifikasi keluar senilai Rp.292,092,137.00 Reklasifikasi keluar ini merupakan perincian pencatatan atas peralatan dan mesin yang ada di TTP-Pototano. Sebagaimana di ketahui, TTP Pototano di hibahkan kepada Bapal Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat pada akhir tahun 2020.
4. Koreksi Pencatatan senilai Rp.25,000,000.00 berupa perubahan tahun karena kesalahan pencatatan yang mengakibatkan perubahan nilai penyusutan. Koreksi Pencatatan dilakukan untuk Mesin Tetas.





### C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp15,103,378,531.00 dan Rp14,606,238,531.00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>14,606,238,531.00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	382,840,000.00
Pengembangan Melalui KDP	114,300,000.00
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>15,103,378,531.00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-2,300,379,402.00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>12,802,999,129.00</b>

Mutasi transaksi penambahan untuk Gedung dan Bangunan adalah berupa:

No	Kode Aset	Nama Aset	Total
Pengembangan melalui KDP			
1	4010125001	Renovasi Lantai Jemur	114,300,000
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP			
2	4010125001	Pembangunan Lantai Jemur	164,600,000
3	4010129001	Pembangunan Kandang	218,240,000
<b>Total Pembangunan</b>			<b>497,140,000</b>

Tidak ada mutasi transaksi pengurangan untuk Gedung dan Bangunan pada Akhir Tahun 2021.

### C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1,835,214,766.00 dan Rp1,835,214,766.00.

### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp45,902,000.00 dan Rp71,712,000.00. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>71,712,000.00</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-25,810,000.00
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>45,902,000.00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	0.00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>45,902,000.00</b>



Mutasi transaksi pengurangan Aset Tetap Lainnya adalah berupa reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya karena perubahan kondisi asset tersebut dari kondisi baik menjadi kondisi rusak berat. Perincian asset tersebut adalah :

No.	Kode	Uraian Barang	Kuantitas	Nilai
1	6.01.01.02.002	Majalah	5,022	25,110,000
2	6.01.01.02.004	Laporan	96	480,000
3	6.02.02.01.002	Pahatan Kayu	2	220,000
Total				25,810,000

Tidak ada mutasi transaksi pengurangan untuk Aset Tetap Lainnya pada Akhir Tahun 2021.

#### C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-14,221,657,585.00 dan Rp-12,176,223,917.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

##### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	15,014,840,998.00	-11,553,008,416.00	3,461,832,582.00
2.	Gedung dan Bangunan	15,103,378,531.00	-2,300,379,402.00	12,802,999,129.00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,835,214,766.00	-368,269,767.00	1,466,944,999.00
4.	Aset Tetap Lainnya	45,902,000.00	0.00	45,902,000.00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>31,999,336,295.00</b>	<b>-14,221,657,585.00</b>	<b>17,777,678,710.00</b>



### C.3. ASET LAINNYA

#### C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp39,810,000.00 dan Rp39,810,000.00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	39,810,000.00
<b>Jumlah</b>	<b>39,810,000.00</b>

#### C.3.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1,100,345,998.00 dan Rp1,064,969,598.00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>1,064,969,598.00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	199,490,400.00
<b>Mutasi Kurang</b>	
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-172,337,000.00
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	-11,377,000.00
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	-94,710,000.00
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>986,035,998.00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-711,337,732.00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>274,698,266.00</b>

Mutasi transaksi penambahan adalah berupa:

1. Mutasi transaksi penambahan Aset Lain-lain dikarenakan adanya Reklasifikasi dari asset tetap ke asset lainnya senilai Rp.199,490,400 perubahan kondisi atas asset lain-lain yang sudah tidak terpakai lagi (rusak) menjadi aset tetap. Perubahan kondisi dilakukan karena adanya perbaikan atas asset tersebut.

Mutasi transaksi pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa:

1. Mutasi transaksi pengurangan Aset Lain-lain dikarenakan adanya reklasifikasi dari asset lainnya menjadi asset tetap sebagai akibat dari perubahan kondisi atas beberapa asset menjadi rusak berat.



2. Transaksi normalisasi karena terjadi nilai buku minus pada semester-1 dan akhir tahun 2021 saat dilakukan rekonsiliasi.
3. Penghapusan BMN dilakukan setelah terbitnya surat persetujuan dari Biro KP terkait lelang 10 unit sepeda motor (kode barang : 3.02.01.04.001) yang nilai perolehannya mencapai Rp.94,710,000. Usulan Lelang BMN atas kendaraan bermotor dari BPTP NTB adalah sejumlah 13 NUP Sepeda Motor, tapi saat lelang hanya 10 NUP Sepeda Motor yang terlelang. Perincian hasil lelang tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Merk/Tipe	NUP	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Hasil Lelang	No. Polisi
1	Suzuki Thunder EN 125	16	2007	13,855,000	1,555,000	DR 2156 J
2	Suzuki Thunder EN 125	17	2007	13,855,000	2,555,000	DR 2154 J
3	Suzuki Thunder EN 125 A	34	2011	8,000,000	1,500,000	DR 2245 J
4	Suzuki Thunder EN 125 A	35	2011	8,000,000	1,850,000	DR 2246 J
5	Suzuki Thunder 125 A	36	2011	8,000,000	1,500,000	DR 2247 J
6	Suzuki Thunder 125 A	37	2011	8,000,000	1,500,000	DR 2248 J
7	Suzuki Thunder 125 A	38	2011	8,000,000	1,500,000	DR 2249 J
8	Suzuki Thunder 125 A	39	2011	8,000,000	1,555,000	DR 2250 J
9	Suzuki Shogun FL 125 SD	40	2011	8,000,000	1,700,000	DR 2251 J
10	Honda MCB	53	2011	11,000,000	3,888,000	DR 2714 DL
<b>Total</b>				<b>94,710,000</b>	<b>19,103,000</b>	

### C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-921,974,972.00 dan Rp-1,010,665,423.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

#### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	39,810,000.00	-170,827,240.00	-131,017,240.00
2.	Aset Lain-lain	986,035,998.00	-711,337,732.00	274,698,266.00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>1,140,155,998.00</b>	<b>1,025,845,998.00</b>	<b>-921,974,972.00</b>



## C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

### C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp12,185,802.00 dan Rp10,559,508.00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	3,565,189.00	1,680,000.00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	8,620,613.00	8,879,508.00
<b>Jumlah</b>	<b>12,185,802.00</b>	<b>10,559,508.00</b>

Di akhir tahun 2020, muncul belanja pegawai yang masih harus dibayar, yang merupakan kenaikan belanja fungsional a.n. Totok Blegoh dan Sabar untung. Atas belanja yang masih harus di bayar tersebut sudah dilakukan pembayaran pada awal tahun 2021.

Sementara diakhir tahun 2021 muncul belanja pegawai yang masih harus dibayar yang merupakan kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji karena naik pangkat a.n Darwis, Abdullah, Nani. Dan belanja barang yang masih harus dibayar atas pemakaian listrik dan telephon bulan desember 2021.

## C.5. EKUITAS

### C.5.1 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp36,133,130,282.00 dan Rp38,723,771,936.00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp512,618,100.00 dan Rp714,583,110.00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	308,564,800.00	474,450,000.00	-34.96
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	185,468,000.00	89,110,000.00	108.13
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	4,980,000.00	130,830,500.00	-96.19
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	1,105,000.00	8,870,000.00	-87.54
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	1,092,000.00	1,400,000.00	-22.00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	11,408,300.00	9,922,610.00	14.97
<b>Jumlah</b>	<b>512,618,100.00</b>	<b>714,583,110.00</b>	<b>-28.26</b>

Terdapat selisih senilai Rp19,104,055 antara Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Laporan Operasional senilai Rp512,618,100 dan LRA senilai Rp531,722,155. Selisih terjadi karena adanya Setoran Hasil Lelang Barang Milik Negara yang dilakukan KPKNL atas nama Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat. Dalam laporan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, nilai sebesar Rp19,104,055 diklasifikasikan sebagai pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin.

### D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp7,537,167,764.00 dan Rp7,646,502,959.00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.



Perbandingan Beban Pegawai  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	4,783,461,169.00	4,952,762,320.00	-3.42
Beban Pembulatan Gaji PNS	64,870.00	63,004.00	2.96
Beban Tunj. Anak PNS	115,473,716.00	119,238,400.00	-3.16
Beban Tunj. Beras PNS	284,103,660.00	255,352,920.00	11.26
Beban Tunj. Fungsional PNS	952,940,000.00	902,670,000.00	5.57
Beban Tunj. PPh PNS	34,228,069.00	30,515,229.00	12.17
Beban Tunj. Struktural PNS	20,880,000.00	32,760,000.00	-36.26
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	355,852,480.00	368,773,586.00	-3.50
Beban Tunjangan Umum PNS	113,795,000.00	129,135,000.00	-11.88
Beban Uang Lembur	141,496,000.00	69,992,000.00	102.16
Beban Uang Makan PNS	734,872,800.00	785,240,500.00	-6.41
<b>Jumlah</b>	<b>7,537,167,764.00</b>	<b>7,646,502,959.00</b>	<b>-1.43</b>

Ada Perbedaan antara Beban Pegawai di Laporan Operasional senilai Rp7,537,167,764 dengan Belanja Pegawai di LRA Rp7,535,282,575. Selisih senilai Rp1,885,189. Perincian selisih tersebut, adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal	Nilai
1	Jurnal penyesuaian atas dibayarnya belanja pegawai yang masih harus dibayar pada akhir tahun 2020	1-Jan-21	-1,680,000
2	Jurnal penyesuaian atas kekurangan gaji karena kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala a.n Kaharudin dan Suparman	31-Dec-21	1,759,189
3	Jurnal penyesuaian atas kekurangan gaji karena kenaikan pangkat a.n Abdullah Sika, Darwis, Nani Herawati dan Fata Hasan Ihromy	31-Dec-21	1,806,000
<b>Total</b>			<b>1,885,189</b>

Nilai belanja pegawai yang masih harus dibayar muncul karena SK kenaikan pangkat maupun SK gaji berkala baru di terima akhir tahun berjalan (bulan desember) ketika SPM /SP2D gaji pegawai sudah di usulkan.



**D.3. Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1,903,294,477.00 dan Rp1,998,106,271.00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	258,755,000.00	3,663,945.00	6,233.86
Beban Persediaan konsumsi	1,677,123,477.00	1,951,279,026.00	-14.35
Beban persediaan lainnya	0.00	43,163,300.00	-100.00
<b>Jumlah</b>	<b>1,935,878,477.00</b>	<b>1,998,106,271.00</b>	<b>-4.75</b>

Nilai beban persediaan pada Laporan Operasional per 31 Desember 2021 dan nilai transaksi pemakaian yang tercantum pada laporan persediaan di E-Rekon senilai Rp1,935,892,477. Tidak terdapat selisih antara Laporan Operasional per 31 Desember dan nilai transaksi pemakaian yang tercantum pada laporan persediaan di E-Rekon.

**D.4. Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3,892,567,138.00 dan Rp2,686,217,134.00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Bahan	185,535,100.00	152,035,000.00	22.03
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	915,114,081.00	0.00	0.00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,109,257,029.00	778,238,902.00	42.53
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	124,680,000.00	124,680,000.00	0.00
Beban Honor Output Kegiatan	370,548,000.00	580,510,000.00	-36.17



Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	109,185,000.00	32,300,750.00	238.03
Beban Jasa Konsultan	75,523,991.00	2,121,000.00	3,460.77
Beban Jasa Profesi	34,500,000.00	9,250,000.00	272.97
Beban Keperluan Perkantoran	726,175,865.00	654,904,892.00	10.88
Beban Langganan Listrik	171,920,647.00	201,348,283.00	-14.62
Beban Langganan Telepon	951,375.00	1,399,557.00	-32.02
Beban Sewa	69,176,050.00	149,428,750.00	-53.71
<b>Jumlah</b>	<b>3,892,567,138.00</b>	<b>2,686,217,134.00</b>	<b>44.91</b>

#### D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp666,830,244.00 dan Rp767,949,979.00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	285,219,500.00	360,370,100.00	-20.85
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	0.00	4,620,000.00	-100.00
Beban Pemeliharaan Jaringan	19,998,500.00	28,796,850.00	-30.55
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	361,612,244.00	360,785,000.00	0.23
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0.00	13,378,029.00	-100.00
<b>Jumlah</b>	<b>666,830,244.00</b>	<b>767,949,979.00</b>	<b>-13.17</b>

#### D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1,645,386,685.00 dan Rp656,635,640.00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:



Perbandingan Beban Perjalanan Dinas  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	836,269,129.00	559,042,019.00	49.59
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	809,117,556.00	0.00	0.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0.00	2,000,000.00	-100.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0.00	2,400,000.00	-100.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0.00	93,193,621.00	-100.00
<b>Jumlah</b>	<b>1,645,386,685.00</b>	<b>656,635,640.00</b>	<b>150.58</b>

**D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat**

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1,199,995,370.00 dan Rp0.00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	238,897,495.00	0.00	0.00
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	961,097,875.00	0.00	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>1,199,995,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2,067,880,124.00 dan Rp2,107,229,701.00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan



dan Amortisasi untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	593,997,358.00	577,439,203.00	2.87
Beban Penyusutan Irigasi	24,488,607.00	14,246,189.00	71.90
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	50,564,060.00	37,662,655.00	34.26
Beban Penyusutan Jaringan	10,445,820.00	8,199,571.00	27.39
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	11,739,089.00	15,696,083.00	-25.21
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,376,645,190.00	1,453,986,000.00	-5.32
<b>Jumlah</b>	<b>2,067,880,124.00</b>	<b>2,107,229,701.00</b>	<b>-1.87</b>

#### D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp-9,645,000.00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0.00	-9,645,000.00	-100.00
<b>Jumlah</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,645,000.00</b>	<b>-100.00</b>

#### D.11. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:



Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional  
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0.00	-4,200,001.00	-100.00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0.00	- 1,028,022,833.00	-100.00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0.00	626,850.00	-100.00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0.00	523,057,538.00	-100.00
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	35,268,500.00	212,759,500.00	-83.42
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	19,104,055.00	0.00	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>54,372,555.00</b>	<b>-295,778,946.00</b>	<b>-118.38</b>





## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

### **E.1. Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp38,723,771,936.00 dan Rp37,949,596,394.00.

### **E.2. Surplus/Defisit-LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp-18,346,252,677.00 dan Rp-15,434,192,520.00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### **E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar**

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-24,150,093.00 dan Rp267,260,487.00.

#### **E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi**

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-7,175,089.00 dan Rp-2,250,000.00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi reklasifikasi nilai persediaan, aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

#### **E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp273,106,000.00.

#### **E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-16,975,004.00 dan Rp-3,595,513.00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:



## Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2021 .

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2021
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	9,257,286.00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	10,844,710.00
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-11,377,000.00
Peralatan dan Mesin	-25,700,000.00
<b>Jumlah</b>	<b>-16,975,004.00</b>

**E.4. Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp15,779,761,116.00 dan Rp15,941,107,575.00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

## Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2021 .

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2021
Ditagihkan ke Entitas Lain	16,247,323,291.00
Diterima dari Entitas Lain	-531,722,155.00
Pengesahan Hibah Langsung	64,159,980.00
<b>Jumlah</b>	<b>15,779,761,116.00</b>

**E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2021 saldo DDEL adalah sebesar Rp-531,722,155.00 sedangkan DKEL sebesar Rp16,247,323,291.00.

**E.4.2. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp64,159,980.00 dan Rp2,700,511,386.00.



Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp-50,449.00.

Hibah langsung yang di terima BPTP NTB adalah Hibah ACIAR yang berasal dari Australia. Nama kegiatan yang didanai oleh Dana Hibah dari ACIAR tersebut adalah Improving Cattle Production and Smallholder Livelihoods in Crop-Based Farming Systems in Indonesia. Jangka waktu HIBAH ACIAR adalah 1 Oktober 2018 - 30 Juni 2021 diperpanjang s/d 31 Juli 2022.

#### **E.5. Ekuitas Akhir**

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-2,590,520,124.00 dan Rp774,175,542.00.



## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

- Pada tahun 2021 BPTP-NTB telah mengalami sembilan kali revisi DIPA karena refocusing anggaran dan revisi dana Hibah. DIPA awal BPTP-NTB senilai Rp18,944,616,000.00 menjadi Rp17,659,304,000.00 pada tanggal 06 Desember 2021 saat Revisi DIPA ke-9. Terjadi penurunan Pagu Anggaran karena refocusing kegiatan terkait penanganan Pandemi Covid-19
- Telah dilakukan revisi DIPA atas revisi setoran PNBPN ada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat di bulan Oktober 2021.
- Telah dilakukan revisi DIPA atas revisi dana HIBAH ACIAR ada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat di akhir tahun 2021.

### F.2. Pengungkapan Lain-lain

- Berdasarkan SK Kepala BPTP-NTB Nomor : 02/KU.010/H.12.17/01/2021 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada satuan Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB TA.2021. Nama Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di BPTP-NTB adalah sebagai berikut :
  - Sri Marmiyati : Bendahara Pengeluaran
  - Husnul Ummy: Bendahara Penerimaan
- Berdasarkan SK Kepala BPTP-NTB Nomor : 926/KU.010/H.12.17/09/2021 tentang Perubahan kedua Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada satuan Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB TA.2021. Nama PPSPM sejak tanggal 14 September 2021 adalah sebagai berikut :
  - Arif Patarani S.Adm



# Lampiran :

1. Berita Acara Rekonsiliasi
2. Laporan Keuangan Print out dari E-Rekon per 31 Desember 2021
  - a. Laporan Realisasi Anggaran Face
  - b. Laporan Operasional
  - c. Laporan Perubahan Ekuitas
  - d. Neraca Percobaan AkruaI
  - e. Neraca Face
3. Kertas Kerja Telaah hasil print out E-Rekon per 31 Desember 2021
4. Scan Berita Acara Rekonsiliasi SAIBA – SIMAK
5. Scan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan
6. Scan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran
7. Scan Rekening Koran Hibah ACIAR
8. Scan Stock Opname
9. Rincian Saldo Kas Bendahara
10. Rincian Proyek Hibah
11. Rekapitulasi Piutang Bukan Pajak
12. Rekapitulasi TP/TGR
13. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan
14. Analisa Pendapatan
15. Rekap Realisasi Anggaran dan Belanja Penanganan Covid
16. Rekap Belanja 526